

PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DI KOTA MATARAM

Muh. Isnaini Hamidi

Universitas Mataram

Isnaen06@gmail.com

Eni Indriani

Universitas Mataram

eni.indriani@unram.ac.id

Yusli Mariadi

Universitas Mataram

yuslimariadi@unram.ac.id

Disubmit : 21 Januari 2023

Direview : 10 Mei 2023

Diterima : 23 Juni 2023

Abstract

Education funds are often misused in their allocation, institution that is main actor in this problem is the Office of Education and Schools. The misappropriation of BOS funds shows that the government's internal control is lacking in minimizing this. This study aims to determine the implementation of internal control in the Mataram City Education Office in managing the BOS funds and the suitability of the internal control implemented with the Government Internal Control Standards. This type of research is qualitative research with a case study approach. Data collection techniques were carried out through depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the internal control for BOS fund management implemented by the Education Office was in the form of socializing technical guidelines for managing, implementing prosedur for supervising, providing technical guidance, checking conformity of BOS fund management documents, monitoring and evaluation, and issuance of a letter of recommendation. The internal control implemented by the Mataram City Education Office is abywith technical guidelines and government internal control rules. This is evidenced by the implementation of standard operating procedure and technical guidance on the management BOS funds, as well as fulfilling the five elements of control components contained in government regulations.

Keywords: *BOS Funds; BOS Funds Technical Guidelines; Internal Control; Monitoring and Evaluation.*

Abstrak

Dana pendidikan kerap kali disalahgunakan dalam pengalokasiannya, lembaga yang menjadi actor utama dalam masalah ini adalah Dinas Pendidikan dan Sekolah penerima dana BOS. Penyelewengan dana BOS menunjukkan pengendalian internal pemerintah dirasa kurang dalam meminimalisir hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian internal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kesesuaian pengendalian internal yang diterapkan dengan Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Jenis penelitian ini adalah

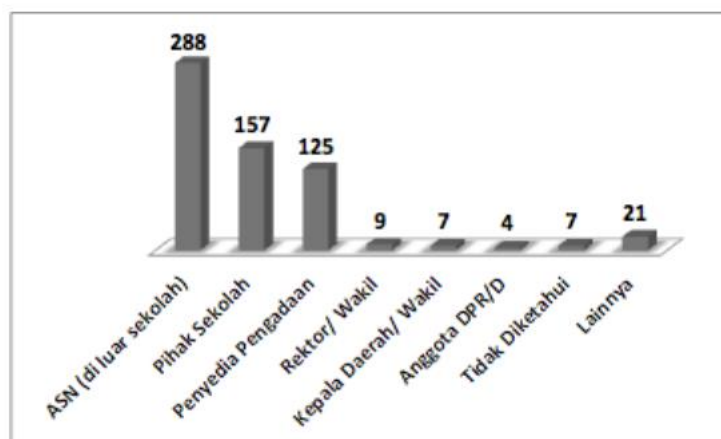
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pengelolaan dana BOS yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan berupa sosialisasi juknis pengelolaan dana BOS, penerapan SOP pembimbingan dana BOS, memberikan bimbingan teknis (Bimtek), pemeriksaan kesesuaian dokumen pengelolaan dana BOS, melakukan monitoring dan evaluasi (monev), dan pengeluaran surat rekomendasi pencairan dana BOS untuk sekolah yang bersangkutan. Pengendalian internal yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan pengendalian internal pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan penerapan SOP dan pembimbingan teknis pengelolaan dana BOS, serta memenuhi lima unsur komponen pengendalian yang ada dalam peraturan SPIP instansi pemerintah.

Kata Kunci: Dana BOS, Monitoring dan evaluasi, Pengendalian Internal, Petunjuk Teknis BOS.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pendidikan kerap kali terkendala dengan biaya yang memberatkan sehingga menyebabkan tingkat pendidikan suatu negara tidak kunjung meningkat (Irawan, 2016). Dana Bantuan Operasional Sekolah menjadi upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini. Dana BOS adalah dana untuk kegiatan nonpersonalian dan dapat digunakan untuk aktivitas lain sesuai dengan petunjuk teknis pengelolannya (Kementerian Pendidikan, 2021). Penyalahgunaan dana BOS sudah kerap kali terjadi, setiap tahun selalu ditemukan kasus tersebut. Berdasarkan laporan dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW) selama 3 tahun terakhir kasus korupsi dana pendidikan di Indonesia meningkat, khususnya dimasa pandemi. Lembaga yang paling banyak melakukan penyelewengan terhadap dana pendidikan ditemukan 2 lembaga, yaitu Dinas Pendidikan dan Sekolah penerima dana BOS (Sjafrina & Anggraeni, 2021). Motif yang kerap kali digunakan sebagai alasan mulai dari kurangnya pemahaman sampai dengan transaksi fiktif seperti pemalsuan bukti transaksi dan bukti lainnya.

Gambar 1. Latar Belakang Tersangka Korupsi Dana Pendidikan yang ditindak penegak hukum 2016 – 2021 (612 kasus)



Pengendalian internal menjadi upaya *preventive* terbaik dalam mencegah penyalahgunaan dana BOS karena mampu menjaga asset dan memberikan informasi yang akurat dan andal serta mendorong efisiensi jalannya organisasi (Lathifah, 2021). Beberapa

penelitian sebelumnya membahas pengendalian internal dari sisi sekolah penerima dana BOS. Evaluasi pengendalian internal pengeluaran kas dana BOS (Putri, 2019) dilakukan di SMP 2 Kalianget. Evaluasi pengendalian internal pengeluaran kas dana BOS (Gaol, 2020) dengan studi kasus di SDN 16 Urat Timur. Evaluasi pengendalian internal dengan pendekatan COSO pada Pengelolaan dana BOS (Ferliansyah, 2021) studi kasus pada SMAN 1 Prabumulih. Sekolah penerima dana BOS diberikan keleluasan dalam mengelola dana yang diberikan namun tetap dalam batasan regulasi yang ada (Kurniawan et al., 2018). Fokus yang paling berbeda dalam penelitian ini terhadap beberapa penelitian sebelumnya adalah membahas peranan Dinas Pendidikan dalam menjaga penggunaan dana BOS oleh sekolah. Pengendalian dari sisi Dinas Pendidikan akan jauh lebih efektif daripada sekolah yang bersangkutan melakukan pengendalian mandiri. Pengendalian internal dari sisi Dinas Pendidikan ibarat auditor eksternal yang independent karena Dinas Pendidikan bertindak sebagai pengawas yang tidak masuk struktur sekolah secara khusus, sehingga pengendalian internal dari sisi Dinas Pendidikan akan jauh lebih terhindar dari bias dan salah saji yang material. Jika pengendalian internal hanya dilakukan di sekolah, peluang terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak dalam penyajian laporan keuangan cukup besar. Maka dalam penelitian ini penting kiranya untuk dilakukan pengendalian internal dari sisi eksternal sekolah, yaitu Dinas Pendidikan Kota Mataram. Selain hal tersebut, penilaian terhadap pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram juga diperlukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian internal di Dinas Pendidikan Kota Mataram terhadap sekolah penerima dana BOS di Kota Mataram. Pengendalian internal yang diterapkan kemudian akan dikomparasikan dengan aturan standar pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI no. 60 tahun 2008. Pengendalian internal dari sisi Dinas Pendidikan Kota Mataram menjadi penting karena sekolah penerima dana BOS diarahkan dan diawasi oleh Dinas Pendidikan selaku tim BOS Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian bertempat di Dinas Pendidikan Kota Mataram dengan responden sebanyak 5 orang karyawan yang menjadi tim BOS Daerah/Kota. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa foto dan dokumen pengelolaan dana BOS. Dalam wawancara, secara keseluruhan terdapat pertanyaan mengenai peran Dinas Pendidikan Kota Mataram, prosedur pengelolaan dana BOS, pengendalian internal yang diterapkan, dan pengawasan serta pembimbingan yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan terhadap sekolah penerima dana BOS. Pengolahan atau analisis semua data yang diperoleh, dilakukan melalui reduksi data dengan Langkah awal mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai poin pertanyaan kemudian membuang data-data yang kurang relevan atau tidak berkaitan dengan pertanyaan dalam wawancara. Proses analisis data berikutnya berupa penyajian data dengan cara menjabarkan poin-poin utama yang menjadi jawaban atas persoalan yang dibahas dalam penelitian berikut dengan penelitian terdahulu yang menegaskan hasil tersebut. Proses terakhir berupa penyajian kesimpulan berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang dibahas dalam bab pembahasan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana BOS oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini berperan sebagai tim BOS Daerah yang menyetujui dan mengesahkan serta mengontrol rencana kegiatan dan anggaran serta realisasinya oleh sekolah penerima dana BOS. Pengelolaan dana BOS di sisi sekolah meliputi tiga aspek, yaitu perencanaan berupa RKAS, pelaksanaan dan penatausahaan berupa

surat pertanggungjawaban, dan pelaporan berupa laporan pertanggungjawaban. Pengelolaan dari perencanaan hingga pelaporan harus dilakukan dengan baik dan tertib karena akan berpengaruh terhadap potensi kecurangan yang ada (Putra et al., 2022). Ketiga aktivitas inilah yang dikontrol oleh tim BOS Daerah dibawah Dinas Pendidikan Kota Mataram agar aktivitas tersebut terhindar dari kekeliruan yang tidak diharapkan.

Pengendalian internal dalam rangka mengontrol penggunaan dana BOS oleh sekolah dibawah Dinas Pendidikan Kota Mataram dilakukan melalui beberapa proses, seperti sosialisasi pengelolaan dana BOS. Pengelola dana BOS di pihak sekolah kurang memahami bagaimana mengelola dana BOS yang diterima (Masruroh & Fitriani, 2021). Kurangnya pemahaman ini akan berimbas pada pengelolaan dana BOS yang kurang maksimal bahkan salah dalam implementasinya. Edukasi yang diberikan melalui sosialisasi pengelolaan dana BOS dapat meminimalisir kesalahan pengelolaan dana BOS karena kurangnya pemahaman dari penerima dana BOS. Upaya pengendalian juga dilakukan melalui penerapan SOP pembimbingan dana BOS. Penerapan SOP yang ada menjadikan pengelolaan dana BOS lebih terstruktur. Melalui SOP ini pula tim BOS daerah memaksimalkan edukasinya agar pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah terhindar dari kesalahan karena kurang pemahaman. Pemberian bimbingan teknis dan pengarahan juga dilakukan sebagai upaya pengendalian internal (Rahmadani & Suparno, 2020). Wujud dari pengendalian yang dilakukan adalah tim BOS daerah memeriksa dokumen yang dibuat dengan cara manual dan alat bantu berupa aplikasi Excel RKAS. Seteleah diperiksa, sekolah akan diberikan rekomendasi poin-poin yang harus diperbaiki.

Pemeriksaan kesesuaian antar dokumen pengelolaan dana BOS berperan penting dalam memastikan dana BOS telah digunakan sesuai dengan peruntukannya (Ashiana et al., 2022). Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim BOS Daerah ketika laporan tersebut dikumpulkan, kemudian diberikan koreksi jika ada hal-hal yang harus direvisi. Pemeriksaan dokumen ini menjadi langkah pengendalian lanjutan untuk memastikan setiap dokumen yang dikumpulkan bebas dari kekeliruan dalam penyusunannya. Langkah pengendalian berikutnya berupa monitoring dan evaluasi. Monev menjadi ciri khas pengendalian internal yang diterapkan diberbagai lembaga untuk menjaga asset organisasi (Seyselis & Pradana, 2021). Tim BOS Daerah melakukan monev secara terjadwal per triwulan dengan terjun langsung memastikan belanja-belanja yang dilakukan oleh sekolah ada wujud atau bukti fisiknya. Langkah terakhir sebagai upaya pengendalian internal diterapkan melalui pemberina surat rekomendasi pencairan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah penerima dana BOS. Pengelola dana BOS memiliki fungsi otorisasi sehingga dalam pengeluaran dana terjadi ketika otoriator selaku pihak yang berwenang menjalankan fungsinya (Panjaitan, 2019). Surat ini diberikan ketika sekolah telah mengumpulkan semua dokumen pengelolaan dana BOS dan SK penyaluran dana BOS dari kementerian.

Pengendalian internal terhadap pengelolaan dana BOS yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Mataram didapati telah sesuai dengan aturan SPIP yang tertuang dalam PP RI no. 60 tahun 2008. Hal ini diketahui melalui terpebuhinya komponen pengendalian yang ada dalam SPIP. Lingkungan pengendalian diterapkan melalui aturan perilaku, penerapan budaya disiplin, memiliki struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab. Dinas Pendidikan Kota Mataram memiliki struktur organisasi yang sekaligus menegaskan tugas dan wewenang yang berbeda dari setiap bidang yang ada. Untuk mendisiplinkan sekolah, pihak Dinas memanggil sekolah yang belum menyelesaikan dokumen pengelolaan dana BOS ketika waktu pengumpulannya sudah mendekati batas akhir.

Penilaian Resiko diterapkan melalui penetapan tujuan tim BOS Daerah, identifikasi resiko baik dari sisi internal maupun eksternal. Dana BOS yang diterima oleh sekolah kerap kali

disalahgunakan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman pihak Sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Faktor lain yang dapat menyebabkan hal ini terjadi adalah karena kesengajaan dari pihak pengelola sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Identifikasi dan analisis resiko ini digunakan untuk menyusun kegiatan pengendalian yang dapat mencegah resiko tersebut terjadi (Fadhurrahman, 2019).

Berdasarkan analisis resiko yang ada, diterapkanlah aktivitas pengendalian internal. Aktivitas pengendalian diterapkan melalui pemisahan tugas dan tanggungjawab seperti pemeriksa laporan dokumen penggunaan dana BOS berbeda dengan pihak yang mengeluarkan surat perintah pencairan dana BOS. Selain itu terdapat sosialisasi pengelolaan dana BOS sebagai upaya preventif pengendalian internal sehingga laporan yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aktivitas pengendalian berikutnya berupa penerapan SOP bimbingan dana BOS sebagai regulasi yang mengatur alur pembimbingan agar berjalan secara sistematis sehingga sekolah tidak bisa melompati proses pemeriksaan yang telah ditetapkan. Bimbingan dan pengarahan secara teknis juga diterapkan dalam kerangka aktivitas pengendalian, aktivitas ini memungkinkan pihak Dinas Pendidikan berinteraksi langsung dengan sekolah untuk mengoreksi setiap laporan yang dikumpulkan kemudian diberikan *feedback* guna keperluan penyempurnaan dokumen pelaporan penggunaan dana BOS. Proses aktivitas pengendalian berikutnya adalah pemeriksaan dokumen perencanaan dan pelaporan, kedua dokumen ini dikomparasikan berikut dengan bukti-buktinya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan realisasi yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban. Terakhir, dalam rangka melaksanakan aktivitas pengendalian internal pihak Dinas mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana BOS sebagai dokumen yang wajib dibawa untuk mencairkan dana BOS yang sudah masuk melalui rekening Sekolah penerima dana BOS. Dokumen ini dikeluarkan ketika Sekolah telah menyelesaikan prosedur-prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga ketika surat rekomendasi ini keluar dapat dipastikan dokumen pelaporan yang dikumpulkan oleh Sekolah sudah lengkap sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

Komponen pengendalian berikutnya berupa informasi dan komunikasi, penerapannya berupa penggunaan aplikasi pengolah angka berupa *Microsoft excel* dalam membuat RKAS, selain itu diterapkan sistem informasi berupa aplikasi ARKAS yang terintegrasi dengan sistem pelaporan dana BOS. Agar komunikasi berjalan efektif, pihak Dinas membuat group komunikasi khusus sekolah penerima dana BOS untuk menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan dana BOS. Komponen pengendalian terakhir berupa pemantauan pengendalian Internal, diterapkan melalui evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir tahun dan memkomparasikan kinerja tim BOS daerah dibawah Dinas Pendidikan Kota Mataram dengan tim BOS di daerah lain. Evaluasi ini membahas perkembangan pengelolaan dana BOS yang dilakukan termasuk didalamnya adalah hambatan dan masalah yang ditemui di tahun yang bersangkutan. Sehingga dalam evaluasi tersebut pula dihasilkan upaya langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh tim BOS Daerah.

SIMPULAN

Pengendalian internal pengelolaan dana BOS di Dinas Pendidikan Kota Mataram diterapkan melalui enam kegiatan pengendalian, yaitu sosialisasi pengelolaan dana BOS, penerapan SOP pembimbingan, melakukan pembimbingan teknis pengelolaan dana BOS, pengecekan berbagai dokumen pengelolaan dana BOS, monitoring dan evaluasi, serta pemberian surat rekomendasi pencairan dana BOS. Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan terhadap pengelolaan dana BOS yang dilakuka oleh sekolah telah sesuai dengan Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Kesesuaian ini dibuktikan dengan

terpenuhinya kelima komponen pengendalian yang ada dalam SPIP. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupannya, penelitian ini terbatas pada penjabaran penerapan model pengendalian internal di Dinas Pendidikan Kota Mataram kemudian mengkomparasikannya dengan aturan SPIP dan Juknis dana BOS. Untuk peneliti berikutnya disarankan agar melengkapi penelitian ini dengan berfokus pada evaluasi pengendalian internal dan solusi yang dapat ditawarkan untuk melengkapi pengendalian internal yang diterapkan sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Sehingga penelitian dengan topik ini memiliki cakupan pembahasan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiana, Amaliyah, & Sadijah. (2022). *Prosedur Pengendalian Internal Dalam Mencegah Dan Mendeteksi Terjadinya Fraud Pada Sekolah Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19. Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE).*
- Fadhlurrahman, F. (2019). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (studi kasus pada seluruh sekolah menengah pertama penerima dana BOS di Kota Serang). Respository UPI (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).*
- Ferliansyah. (2021). *Evaluasi Pengendalian Internal Menggunakan Pendekatan COSO pada Pengelolaan Dana BOS Reguler di SMAN 1 Prabumulih.* 7, 6.
- Gaol, E. L. (2020). *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Sd Negeri 16 Urat Timur.*
- Irawan, S. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Andir Kota Bandung). Institutional Repositories and Scientific Journal (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi Unpas Bandung).*
- Kementerian Pendidikan. (2021). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler - Peraturan Menteri Pendidikan.*
- Kurniawan, P. S., Yuniarta, G. A., & Ariastini, N. K. D. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Bos Se-kabupaten Klungkung.* 8(02).
- Lathifah, N. (2021). *Konsep dan Praktik Sistem Pengendalian Internal.* https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_dan_Praktik_Sistem_Pengendalian_I/Ffeteaaaqbaj?hl=Id&Gbpv=1&Dq=Pengendalian+Internal&printsec=frontcover
- Masruroh, & Fitriani. (2021). *Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Ypk Kesatuan Jakarta. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Non Formal,* 07(02). <https://doi.org/https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/489>
- Panjaitan, R. P. (2019). *Pelaksanaan Pengendalian Internal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Pendekatan Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara. Jurnal Manajemen Keuangan Publik,* 3(2), 15–24. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.523>
- Putra, Widyaningsih, & Heryana. (2022). *Memerangi Tindakan Fraud Dengan Menghadirkan Sistem Good School Governance Di SekOLAH. ReseachGate Publication.*
- Putri, W. (2019). *Evaluasi Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada SMP Negeri 2 Kalianget. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.*
- Rahmadani, & Suparno. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Dan Peran Komite Sekolah Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan*

Operasional Sekolah (Bos) Pada Smp Negeri Di Banda Aceh. *JIMEKA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 05(03), 400–411.
<https://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/16047>

Seyselis, M., & Pradana, G. W. (2021). Efektivitas Sistem Electronic Monitoring Dan Evaluasi (E-Monev) Di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. *Publika*, 9(1), 37–48.
<https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p37-48>

Sjafrina, & Anggraeni. (2021). *Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi*.